

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang baik untuk dikaji secara lanjut. Tidak suatu hal masalah kemiskinan yang sejak dulu hingga sekarang, dikarenakan semakin meningkatnya suatu kondisi yang dilanda adanya pertentangan dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara yang lainnya.¹

Indonesia adalah negara yang memiliki 34 provinsi dengan keragaman adat istiadat, suku, ras, dan agama. Indonesia juga dikenal dengan negara kepulauan yang tersebar di seluruh nusantara. Letak geografis yang strategis menjadikan indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Namun pada kenyataanya negara masih belum bisa memenuhi, sehingga kondisi ini menimbulkan indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dari beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik dan aspek – aspek lainnya. Selain itu ada salah satu permasalahan yang tidak terselesaikan dari tahun ketahun yaitu kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah

¹ Yosa Saputra, Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dikecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, *JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, 3.*

yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang real ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.²

Setiap negara memiliki permasalahan masing-masing, seperti halnya di Indonesia yang memiliki permasalahan diantaranya dalam bidang sosial ekonomi, karena masyarakat tidak mampu dalam menghadapi suatu perkembangan di era globalisasi.³ Perekonomian juga erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dengan rendahnya sumber daya manusia dapat menjadikan adanya kemiskinan yang meningkat.

Sumber daya manusia merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem pada sebuah organisasi dengan tujuan untuk memastikan kemampuan manusia secara efektif dalam mencapai tujuan.⁴ Dalam teori *Human Capital* bahwa sumber daya manusia sangat berkaitan dengan kualitas kesehatan, keterampilan, dan pendidikan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dalam menyejahterakan masyarakat.⁵ Kemiskinan menjadikan masalah pembangunan dan keterbelakangan yang menjadikan adanya ketimpangan. Pada umumnya masyarakat miskin yang rendah dalam hal kemampuan dan

² Suparlan, P, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 315.

³ Aminah Nur Habibah, Ruslan Abdul Ghofur, Erike Anggraeni, Anas Malik, Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 02 Tahun 2020, 252.

⁴ Mathis, Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal 3.

⁵ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terj. Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 2000), I-5.

terbatasnya akses dalam kegiatan ekonominya masih jauh dari masyarakat yang kemampuannya lebih tinggi.⁶ Oleh karena itu, terjadi banyaknya kemiskinan yang disebabkan adanya ketidaksamaan dalam faktor sumber daya yang dapat menyebabkan perbedaan penghasilan yang didapat dan juga terbatasnya sumber daya dengan kualitas yang sangat rendah.

Konsep kemiskinan secara umum mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi seorang tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual atau bisa dikatakan dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.⁷

Menurut pandangan dalam al-Qur'an, bahwa pengertian kemiskinan adalah kondisi yang disebabkan karena lemahnya kemampuan dalam diri manusia termasuk pada lemahnya psikis maupun fisik manusia dan struktur

⁶ Dedy Utomo, Abdul Hakim, dan Heru Ribawanto, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, 2014, 29-30.

⁷ Mudjarat Kuncoro, "Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan", Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Inten, 2017), 28.

sosial juga menyebabkan kemiskinan.⁸ Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan dengan pengendalian kemiskinan yang termasuk dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi, budaya, politik maupun faktor sosial. Oleh karena itu, menyejahterakan masyarakat yakni suatu bentuk cara meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang ekonominya rendah.

Islam telah memerintahkan umat-Nya untuk saling tolong menolong seperti memberi bantuan kepada fakir miskin, seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 38 :

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah SWT. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(Qs. ar-Rum:38).⁹

Tafsir Qs. Ar-Rum ayat 38 dalam kitab Tafsir Jalalayn (Jalal ad-Din al-Mahalli and Jalal an-Din as-Suyuti) yaitu : “Maka berikanlah kepada kerabat, kepada family yang terdekat (akan haknya) yaitu dengan menyantuninya dan menghubungkan sillaturrahi dengan-Nya (demikian pula kepada fakir miskin dan ibnu sabil) orang yang sedang musafir, yaitu dengan memberikan sedekah kepada mereka, perintah ini ditujukan kepada Nabi saw dan sebagai umat-Nya diharuskan mengikuti jejaknya. (itulah yang lebih baik bagi orang-

⁸ Kariman, Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Solusinya Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, Vol 04 No 01, 2016, 44.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019), 8.

orang yang mencari keridaan Allah) yakni pahala-Nya sebagai imbalan dari apa yang telah mereka kerjakan (dan mereka itulah orang-orang yang beruntung) yaitu orang-orang yang memperoleh keberuntungan.”¹⁰

Berdasarkan Q.S Ar-Rum ayat 38, bahwa setiap makhluk hidup sangat membutuhkan perekonomian untuk memenuhi kehidupannya. Perekonomian adalah suatu aspek yang sangat penting untuk menunjang kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, kesejahteraan itu dilihat dari terpenuhinya kebutuhan psikis, menjaga nilai-nilai batin sehingga terwujudnya keharmonisan sosial.

Bantuan program PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan program keluarga harapan (PKH) adalah suatu program donasi bersyarat yang diberikan secara tunai kepada rumah tangga tidak mampu. Program ini juga bertujuan untuk memutus angka kemiskinan, dapat meningkatkan sumber daya manusia, serta mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diandalkan untuk menciptakan keadilan yang merata dalam bermasyarakat, karena unsur yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan adalah dengan menjadikan pemerintah yang adil serta menciptakan masyarakat sejahtera.

Penerima bantuan PKH diberikan kepada masyarakat miskin. Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi beberapa kriteria kepesertaan program PKH. Sasaran untuk

¹⁰ Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim, Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah*, hlm 70.

penerima bantuan PKH yaitu keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam program pengelolaan data terpadu untuk masyarakat miskin. Bagi yang berhak mendapatkan bantuan PKH ada beberapa komponen yaitu: komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial. Adapun kriteria rumah tangga yang berhak mendapatkan PKH berdasarkan BPS (Biro Pusat Statistik), antara lain :

1. Jenis lantai rumah dari tanah atau kayu.
2. Jenis dinding rumah terbuat dari bambu atau kayu.
3. Luas lantai rumah kurang dari 8m².
4. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas.
5. Pendidikan terakhir yakni tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD.
6. Per bulan mendapatkan gaji di bawah Rp. 600.000.
7. Tidak memiliki barang atau hewan seperti motor, emas, hewan ternak, dan lain-lain.

Tingkat perekonomian yang rendah, disebabkan tidak tercukupinya kebutuhan dasar, dan akan berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup seperti kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Salah satunya di Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Klasifikasi keluarga berdasarkan tingkat perekonomian di Desa Kedungwangi, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Klasifikasi keluarga berdasarkan tingkat perekonomian

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	1.173 KK
2.	Jumlah Penduduk Miskin	297 KK
3.	Jumlah Penduduk Sedang	801 KK
4.	Jumlah Penduduk Kaya	75 KK

Sumber: Wawancara di Balai Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 5 Maret 2022.¹¹

Dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan kepedulian sosial bagi kelompok keluarga miskin yang menjadi bagian dari keluarga penerima manfaat. Sehubungan dengan tujuan program PKH yaitu tepat waktu, sasaran, harga, kualitas, dan juga tepat administrasi. Dengan kebijakan dari program PKH untuk menanggulangi kemiskinan berjalan dengan baik, akan tetapi di Dusun Keduk Desa Kedungwangi dalam implementasi bantuan PKH terdapat indikasi belum maksimal. Seperti kurang tepatnya dalam menentukan penerima yang berhak mendapatkan bantuan, bahwa masyarakat yang tidak mampu seharusnya mendapatkan program tersebut akan tetapi tidak menerimanya.¹²

Pendamping memiliki tugas kepada RTSM penerima PKH, melakukan pertemuan untuk bersosialisasi dengan semua peserta PKH, melakukan

¹¹ Wawancara di Balai Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 5 Maret 2022.

¹² Wawancara, Ibu Fidyatin selaku RT di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 Desember 2021.

koordinasi dengan aparat setempat dan memberi pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH dalam pelaksanaan program dilapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat membantu pelaksanaan program PKH dilapangan. Di Dusun Keduk Desa Kedungwangi dalam teknis pelaksanaan pendampingan sudah sesuai dengan PERMENSOS yakni melakukan sosialisasi dengan pertemuan rutin disetiap bulannya, yang bertujuan untuk merubah pola berfikir dan mised bagi penerima bantuan PKH bahwa untuk masyarakat yang sebenarnya mampu agar tidak selalu mengharapkan bantuan tersebut. Untuk masyarakat yang mampu dan belum memiliki kesadaran untuk melepas bantuan yang ditujukan bagi masyarakat miskin, sehingga harus dilakukan penyuluhan dan pemahaman khusus terhadap tujuan PKH dan kriteria yang pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping program keluarga harapan (PKH) di Desa Kedungwangi yakni Bapak Khozin pada tanggal 30 Desember 2021, beliau menyatakan bahwa Desa Kedungwangi telah menjalankan bantuan sosial yaitu program PKH sejak tahun 2007. Adanya bantuan PKH ini dapat membantu untuk menyejahterakan masyarakat miskin di Desa Kedungwangi Sambeng Lamongan. Salah satunya di Dusun Keduk, Program Keluarga Harapan dalam pengelolaan dan penyaluran bantuannya tidak tepat sasaran, karena ada beberapa KK yang dinilai masih mampu akan

¹³ Wawancara, pendamping PKH di Desa Kedungwangi Sambeng Lamongan, pada tanggal 29 Mei 2022.

tetapi mendapatkan bantuan, padahal masih ada beberapa keluarga yang dinilai tidak mampu dan layak untuk mendapatkan bantuannya.¹⁴

Ada beberapa kriteria yang menerima bantuan PKH di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi sebagai berikut:

1. Petani dengan luas tanah kurang dari 8m.
2. Setiap bulannya mendapat penghasilan diatas Rp. 500.000.
3. Dinding rumah masih kuat.
4. Lantai rumah masih kondisi keramik.
5. Memiliki kendaraan.
6. Bahan bakar masak LPG.
7. Mempunyai hewan peliharaan seperti sapi, dan kambing.¹⁵

Tabel 1.2

Data Daftar Nama Desa Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Pada tahun 2021.

No	Nama Desa	Jumlah Penerima PKH
1.	Desa Ardirejo	102 KK
2.	Desa Barurejo	59 KK
3.	Desa Candisari	55 KK
4.	Desa Garung	61 KK
5.	Desa Gempolmanis	75 KK
6.	Desa Jatipandak	49 KK
7.	Desa Kedungbanjar	53 KK
8.	Desa Kedungwangi	143 KK
9.	Desa Pamotan	79 KK
10.	Desa Pasar Legi	85 KK

¹⁴ Wawancara, Pendamping PKH di Desa Kedungwangi Sambeng Lamongan, pada tanggal 30 Desember 2021.

¹⁵ Observasi, di Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, pada tanggal 10 Desember 2021.

11.	Desa Pataan	73 KK
12.	Desa Sekidang	82 KK
13.	Desa Sidokumpul	78 KK
14.	Desa Selorejo	51 KK
15.	Desa Semampirejo	90 KK
16.	Desa Sumpersari	58 KK
17.	Desa Tenggingring	75 KK
18.	Desa Wateswinangun	59 KK
19.	Desa Wonorejo	48 KK
20.	Desa Wudi	53 KK
21.	Desa Kreteranggon	61 KK
22.	Desa Nogojatisari	57 KK

Sumber data : Jumlah Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan , data diolah peneliti pada tanggal 16 Oktober 2022.¹⁶

Berdasarkan data pendamping se-Kecamatan Sambeng, jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbanyak pada tahun 2021 adalah Desa Kedungwangi yaitu 143 Kepala Keluarga. Dalam mekanisme pelaksanaan program PKH yang ada di Desa Kedungwangi masih perlu ditingkatkan. Karena dari beberapa data yang diperoleh, diketahui bahwa penerima PKH dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, yang artinya dalam pendataan terhadap RTSM yang ada di Dusun Keduk ini, ditemukan ada beberapa keluarga sejahtera yang menerima manfaat dari bantuan PKH. Dengan hal tersebut sudah jelas bahwa tidak memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai penerima manfaat PKH yang benar-benar dari rumah tangga yang sangat miskin. Dapat dilihat dari program bantuan PKH bukan suatu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan dari sebuah proses meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi atau manajemen yang

¹⁶ Observasi, di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Oktober 2022.

baik dalam pengelolaannya, baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat.

Tabel 1.3

**Data Penerima Bantuan PKH di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi,
Sambeng Lamongan :**

No	Pekerjaan	Persentase (%)
1.	Petani	50%
2.	Ibu Rumah Tangga	40%
3.	Buruh	10%
4.	Pedagang	10%

Sumber: Observasi Penerima PKH di Dusun Keduk, pada tanggal 30 Desember 2021.¹⁷

Dari data tabel diatas mengenai penerima bantuan dari PKH di Dusun Keduk, peneliti menemukan masalah yang tidak sesuai dengan peraturan menteri sosial, dengan berbagai kesenjangan dalam pengelolaannya yaitu data penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan memperoleh informasi bahwa masyarakat yang masih mampu untuk memenuhi kehidupannya tidak layak mendapatkan bantuan PKH. Salah satu penerima bansos PKH bidang kesehatan, pendidikan, kepedulian sosial dibuktikan dengan adanya ketimpangan para penerimanya. Sehingga dari bantuan Program Keluarga Harapan di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi masih kurang efektif. Dengan kurang efektifnya dalam penyaluran dananya, program PKH di Dusun Keduk Desa Kedungwangi menyebabkan dampak negatif dalam perekonomiannya, karena sesuai dengan wawancara bersama

¹⁷ Observasi, Penerima bantuan PKH di Dusun Keduk Desa Kedungwangi Sambeng Lamongan, pada tanggal 30 Desember 2021.

informan, bahwa sikap kecemburuan itu pasti ada, apalagi semua pasti menginginkan untuk mendapatkan bantuan PKH, sehingga adanya kecemburuan sosial di tengah lingkungan. Adapun ketergantungan bantuan PKH yang sering dijumpai di tengah masyarakat, seperti halnya ditemukan di lapangan, para penerima bantuan PKH menjadikan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah sebagai penghasilan utama, sehingga mengakibatkan terus menerus berharap mendapatkan bantuan. Dan juga dari masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut, dapat menyebabkan dampak negative dari sisi perekonomian karena tidak terbantu dan juga tidak ada peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi Islam yakni *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil). Dilihat dari pandangan ekonomi Islam dapat menetapkan sistem distribusi dan memberikan pendapatan secara adil serta merata untuk masyarakat miskin dalam menyejahterakan kehidupannya.¹⁸ Tujuan yang paling penting dalam distribusi adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan untuk menghidupkan prinsip solidaritas dalam masyarakat, sehingga ketentraman dalam bermasyarakat dapat direalisasikan, karena dengan distribusi atau penyaluran dana yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan pastinya akan meningkatkan kriminalitas.

Dalam pandangan Islam melarang umat-Nya untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ekonomi Islam juga menjelaskan bahwa prinsip

¹⁸ H. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 131.

distribusi adalah suatu prinsip dalam hal pemerataan dan juga keadilan dalam aspek ekonomi.¹⁹ Titik berat dalam memecahkan permasalahan perkenomian adalah dengan menciptakan mekanisme pendistribusian secara adil di tengah - tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari gagasan ekonomi Islam yang dikembangkan dan mempunyai dampak langsung kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat muslim sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dalam menghilangkan persoalan permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat. Pelaksanaan bantuan PKH di Desa Kedungwangi ada indikasi tidak tepat sasaran yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini dikarenakan ada beberapa data yang belum diperbarui lagi.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada penerima manfaat program PKH harus dilakukan dengan tepat sasaran, oleh karena itu diperlukan data yang valid, data yang sudah ada perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Untuk data penerima mafaat PKH dalam proses verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh pendamping PKH. Proses verifikasi data bantuan PKH, bahwa ada beberapa perbedaan dari tahun ke tahun. Dalam proses verifikasi dan validasi data DTKS di Desa Kedungwangi dilakukan dengan cara survey langsung ke rumah, dengan kebijakan tersebut untuk membuktikan bahwa layak atau tidak mendapatkan bantuan dari PKH. Akan tetapi setelah melakukan survey langsung dilapangan sesuai dengan data penerima manfaat, ditemukan ada beberapa masyarakat yang dinyatakan masih mampu dari sisi rumahnya juga masih layak. Dengan hal ini dalam verifikasi data penerima

¹⁹ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 141.

manfaat PKH perlu diteliti. Dalam tingkat peraturan menteri sosial bahwa dalam penyaluran dana di Dusun Keduk Desa Kedungwangi tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, dalam halnya sudah dibuktikan dilapangan bahwa keadilan di masyarakat kurang diterapkan.

Pelaksanaan bantuan PKH di Desa Kedungwangi, adanya permasalahan dalam hal penyaluran bantuan sosial tersebut karena disebabkan data-data yang masih mengacu dari tahun sebelumnya. Dengan pemilihan lokasi di Dusun Keduk Desa Kedungwangi untuk dijadikan lokasi penelitian, sesuai dengan observasi yang sudah dilakukan bahwa Desa Kedungwangi pada tahun 2021 penerima bantuan PKH jumlah terbanyak dari pada desa-desa yang lain. Dari peserta PKH, uang bantuan yang sudah diberikan juga salah digunakan untuk keperluan lain, seperti membeli bibit tanaman, membeli baju, modal usaha, dan lain-lain.

Oleh karena itu, peneliti lebih memilih pengelolaan bantuan PKH sebagai bahan penelitian, sebab apabila pengelolaan bantuan sosial tersebut dikelola secara adil sesuai prinsip ekonomi Islam serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri sosial RI, maka berguna untuk mendukung potensi Dusun Keduk untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 Perspektif Ekonomi Islam. (Studi di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana proses penyaluran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pendampingan penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan proses penyaluran dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menjelaskan pendampingan penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.

3. Untuk menjelaskan implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah untuk pengembangan ilmu dalam bidang Ekonomi Syariah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri.
- b. Menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai aturan dari Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 di Dusun Keduk, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan kajian penelitian pada studi kasus yang berkaitan dengan Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di IAIN Kediri.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Untuk informasi, bahwa bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menyejahterakan masyarakat miskin dalam memenuhi perekonomian.

E. Kajian Pustaka

Berikut beberapa telaah yang peneliti temukan, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Siti Yuraida Zumaroh, dari mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Kediri, 2020 dengan skripsi yang berjudul “Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Kasus di Desa Sambiresik, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri)”.²⁰ Fokus dalam penelitian ini terkait pelaksanaan pendistribusian bantuan dari BPNT di Desa Sambiresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dari program BPNT tidak sesuai dengan prinsip distribusi Islam,

²⁰ Siti Yuraida Zumaroh, “Program Bantuan Pangan Tunai Non Tunai Dalam Perspektif Distribusi Islam (Studi Kasus di Desa Sambiresik, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri IAIN Kediri, 2020).

dalam menentukan KPM masih mengacu dari tahun 2010. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan meneliti tentang bantuan sosial dari program pemerintah. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah berbeda dari objek penelitian, di mana penelitian terdahulu mengacu kepada pendistribusian bantuan sosial yaitu BPNT, akan tetapi dalam penelitian ini lebih mengacu kepada implementasi bantuan PKH berdasarkan Permensos RI No 1 Tahun 2018 tidak diterapkan bahwa yang mendapat bantuan tidak tepat sasaran dan tidak adanya keadilan.

2. Penelitian oleh Rizcha Rif'atun Ni'mah dari mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Kediri, 2017 skripsi yang berjudul "Peranan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)".²¹ Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa dana dari PKH pada tahap pengelolaannya sudah sesuai dengan peraturan, peran dana PKH yang memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi peran tersebut belum maksimal. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Persamaan pada penelitian ini membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah yaitu program PKH, akan tetapi perbedaannya adalah dari objek

²¹ Rizcha Rif'atun Ni'mah, "Peranan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Kabupaten Kediri), (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri : STAIN Kediri, 2017).

penelitian yang dilakukan serta penelitian ini lebih mengacu terhadap peran dana PKH untuk menyejahterakan masyarakat, akan tetapi peneliti lebih mengacu implementasi bantuan PKH berdasarkan permensos tidak diterapkan dan adanya tidak keadilan dalam penyaluran danannya.

3. Penelitian oleh Hoerunni'mati Sangadah dari mahasiswa Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.²² Dengan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Karangnagka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah dalam tingkat ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan ekonomi melauai bantuan dari program PKH. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ekonominya dari adanya pemberdayaan bantuan PKH mengalami peningkatan. Persamaan dalam penelitian yakni sama-sama meneliti mengenai meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaannya dari objek penelitian dan dari segi fokus penelitiannya. Peneliti lebih fokus kepada implementasi PKH yang tidak sesuai dengan permensos dan juga dalam penyaluran dananya tidak adil.

²² Hoerunni'mati Sangadah, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Karangnagka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas), Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).

4. Penelitian oleh Ulfa Nila Ro'isatul Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020 skripsi yang berjudul "Manajemen Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)".²³ Hasil dalam penelitian ini adalah manajemen bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Janti sudah berjalan akan tetapi belum maksimal dan adanya penyimpangan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai program keluarga harapan (PKH), sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah obyek penelitian, dimana lokasi yang dilakukan penelitian Ulfa Nila Ro'isatul meneliti di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, sedangkan lokasi yang dilakukan oleh peneliti di Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Dan juga perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nila Ro'isatul mengkaji tentang manajemen bantuan PKH dalam perspektif manajemen syariah, sedangkan yang peneliti kaji tentang implementasi bantuan program PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 perspektif Ekonomi Islam.
5. Nurul Fahmi dan Khairil Anwar dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, dengan judul penelitian "Implementasi Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program

²³ Ulfa Nila Ro'isatul, "Manajemen Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri), (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: IAIN Kediri, 2020).

Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2, Oktober 2020.”²⁴ Dengan hasil penelitian bahwa implementasi Permensos dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Desa Berancah sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari fokus penelitian mengenai implementasi bantuan program keluarga harapan (PKH) tidak sesuai dengan peraturan menteri sosial RI No 1 tahun 2018 serta menyimpang dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam.

²⁴ Nurul Fahmi dan Khairil Anwar, “Implementasi Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan.” Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 1 (2), 2020.